

Memanfaatkan Model Keseimbangan Umum Terapan untuk Perumusan Kebijakan: Hikmah dari Pengalaman Negara Lain

Alan A. Powell*

Centre of Policy Studies/IMPACT Project, Monash University

Hengki Purwoto

*Fakultas Ekonomi dan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik
Universitas Gadjah Mada*

ABSTRAK

Di setiap negara, dalam proses perkembangannya, seringkali menghadapi persoalan ekonomi yang ruwet bahkan dahsyat. Peranan para ahli ekonomi sangat diharapkan dalam upaya memecahkan persoalan tersebut dan terutama agar kebijakan yang dipilih berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsanya. Dalam makalah ini kami mencoba menyusun kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari pengalaman negara lain yang memelopori penggunaan model KUT (Keseimbangan Umum Terapan = Applied General Equilibrium) secara berkesinambungan dalam penyusunan maupun analisis kebijakan ekonomi, yaitu, Norwegia dan Australia.

Beberapa kesimpulan dalam tulisan ini sangat mungkin dapat diterapkan di negara-negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Yang harus kita titik-beratkan adalah bahwa walaupun KUT sangat berguna dalam analisis dan penyusunan kebijakan ekonomi, namun KUT hanya salah satu unsur saja dalam proses itu. Pengaruh analisis KUT dalam penyusunan kebijakan, sebagaimana halnya analisis menggunakan metode lainnya, sebenarnya tergantung pada kualitas dalil-dalil yang mendukung analisis tersebut. Dengan kata lain, jangan mengharapkan keajaiban dari KUT, melainkan sebuah proses kemajuan secara berangsur-angsur. Sumber utama kemajuan jangka panjang itu pada hakekatnya muncul dari pemahaman terhadap permasalahan ekonomi secara mendalam yang kita peroleh dari penggunaan metode KUT itu sendiri.

Kata Kunci: Keseimbangan Umum Terapan (*Applied General Equilibrium*)

Klasifikasi JEL: C68

I. PENDAHULUAN

Metode KUT (Keseimbangan Umum Terapan = *Applied General Equilibrium*) merupakan

*Penulis mengucapkan terima kasih kepada Glyn Wittwer dan Djauhari Pambudi dari CoPS di Universitas Monash atas kritik dan saran yang sangat berharga. Meski demikian, kesalahan dan kekurangan yang ada dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

salah satu sumbangan penting dari para ahli ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi. KUT adalah suatu piranti yang potensinya melebihi metode atau cara analisis lainnya apabila diterapkan pada persoalan yang tepat. Isu-isu yang tepat untuk dianalisis menggunakan KUT antara lain; pergeseran struktur ekonomi, persaingan di antara pelaku-pelaku ekonomi, perubahan harga-harga relatif, dampak perdagangan internasional, dan proteksi terhadap sektor-sektor ekonomi. Keunggulan metode KUT yang menonjol adalah komprehensivitasnya; dalam hal ini, segala hubungan yang mengikat satu variabel dengan variabel lain diperhitungkan secara eksplisit.

Makalah pendek ini bertujuan membuka wacana dalam diskusi mengenai penggunaan model formal, khususnya model KUT, dalam proses penyusunan dan analisis kebijakan ekonomi. Pada bagian berikutnya akan dibahas mengenai:

- motivasi umum membangun model
- pengalaman negara pelopor yang memanfaatkan model KUT secara serius dalam penyusunan dan analisis kebijakan ekonomi, yaitu Norwegia dan Australia
- kesimpulan umum mengenai usaha membangun dan menggunakan model KUT yang mungkin relevan untuk negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.

II. MENGAPA MODEL INI DIPERLUKAN?

Model merupakan alat untuk mengorganisir apa yang kita ketahui mengenai persoalan tertentu. Dalam kaitan dengan hal itu, kemampuan tiap-tiap model harus dievaluasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan model tersebut. Dalam konteks kemanfaatannya, sebuah model formal yang dibangun dengan tujuan tertentu (apabila model tersebut pada hakekatnya kita yang menciptakan), setidaknya beberapa manfaat berikut ini dapat kita harapkan.

- (1) Sebuah model formal mengarahkan kita mengidentifikasi secara sistematis, akurat dan eksplisit terhadap konsep-konsep yang tepat untuk menguraikan persoalan yang sedang diteliti.
- (2) Model formal juga mengidentifikasi data-data dasar (database) yang diperlukan untuk mendukung analisis. Dari proses ini, sering kali ditemukan bahwa data dan informasi yang diperlukan tidak lengkap, bahkan tidak ada sama sekali.
- (3) Meskipun boleh-jadi bersifat paradoksal, model formal mampu memperbaiki komunikasi di antara pakar ekonomi. Acapkali upaya yang cukup berat harus dilakukan agar bahasa model tertentu dapat dipahami, tetapi akan sangat membantu apabila semua asumsi yang digunakan oleh pembuat model didokumentasikan dengan rapi dan teliti.
- (4) Metode yang hanya mengandalkan intuisi sulit diajarkan, sedangkan model-model yang berdasarkan asumsi-asumsi eksplisit merupakan dasar bagi pengetahuan yang dapat diajarkan dan yang dapat dipelajari. (Meski demikian, intuisi tetap bernilai tinggi sebagai bagian penting dalam pikiran kita.)
- (5) Model-model yang didasarkan pada asumsi-asumsi eksplisit merupakan kerangka untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman.
- (6) Banyak pertanyaan penting dalam kebijakan ekonomi tidak dapat dianalisis dengan susunan persamaan yang berjumlah kecil. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali menggunakan model formul yang terdiri dari relatif banyak persamaan yang saling berkaitan.

- (7) Akhirnya, usaha yang begitu besar dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dalam ilmu ekonomi yang berciri seperti ilmu pasti, termasuk ekonometrika, yang berkembang pesat dalam lima dasawarsa terakhir ini, akan sia-sia apabila metode formal diabaikan sama sekali.

III. PENGALAMAN NORWEGIA

Usaha pertama kali secara serius memanfaatkan metode KUT untuk analisis kebijakan ekonomi diprakarsai oleh seorang dosen di Universitas Oslo Norwegia, yakni almarhum Leif Johansen (meninggal tahun 1983), menjelang akhir dasawarsa lima-puluhan. Pada hakekatnya, model MSG¹ (Multi-Sectoral Growth) yang terkenal itu adalah buah dari disertasi yang diselesaikannya pada tahun 1959. Tesisnya dijadikan sebagai fokus proyek riset yang dilakukan Johansen bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah Norwegia di Oslo, yaitu Biro Pusat Statistik Norwegia dan Kementerian Keuangan. Instansi-instansi tersebut adalah yang bertanggung-jawab di Norwegia dalam perencanaan ekonomi nasional jangka panjang (semacam Repelita, tetapi dibuat setiap empat tahun).

Ketika Schreiner dan Larsen (1985) mengkaji penggunaan model MSG di Norwegia sebagai alat perencanaan, model tersebut sudah dipakai secara berkesinambungan selama lebih dari dua puluh tahun sejak pertama kali dibangun. Schreiner dan Larsen menemukan kurang-lebih empat puluh laporan dan studi, baik formal maupun semi-formal, menggunakan model MSG sebagai dasar analisis. Sampai saat ini, studi yang menggunakan model MSG diperkirakan sudah mencapai ratusan.

Schreiner dan Larsen juga menemukan bahwa di antara manfaat yang dapat dipetik dari penggunaan model MSG itu adalah disiplin yang mempengaruhi dan membatasi pola pikir si pengguna sebagai akibat dari proses penggunaannya.

"Dari pengalaman pengguna model MSG selama beberapa tahun dapat disimpulkan bahwa selain peranannya sebagai alat perhitungan, model itu secara terstruktur masuk ke dalam pikiran si pengguna mengenai persoalan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penggunaan model tersebut membantu si pengguna membedakan faktor dan variabel yang relatif penting dari faktor dan variabel yang kurang penting (atau dapat diubah tanpa merubah konteks penelitian) dari persoalan yang sedang ditelitinya. Manfaat berupa pelajaran barangkali sama pentingnya dengan perhitungan-perhitungan yang diperoleh." [terjemahan bebas, halaman 255]

Model lengkap sebuah perekonomian seharusnya mencantumkan banyak variabel yang penjelasannya harus dicari di luar model (variabel-variabel eksogen). Misalnya saja, kondisi pasar di luar negeri tidak dapat dijelaskan oleh model yang dibangun khusus untuk menyoroti perekonomian negara tertentu (*single country model*). Hal ini merupakan tantangan, tetapi juga sekaligus kesempatan. Informasi tentang variabel-variabel eksogen dapat ditemukan di berbagai departemen dan instansi, maupun di universitas. Misalnya, ketika pengguna model meminta bantuan seorang ahli di bidang ekspor barang tambang, perhatian ahli tersebut terhadap model mungkin perlu dirangsang, dan boleh jadi dia akan mengusulkan tidak saja angka yang layak untuk beberapa variabel eksogen, tetapi menunjukkan dan memperbaiki kelemahan model berdasarkan sudut pandang

¹Sayangnya, dalam disiplin ilmu ekonomi juga dikenal model lain dengan nama yang sama dan tak kalah pentingnya dengan model yang dijelaskan dalam paper ini, yakni model McKibbin-Sachs Global (McKibbin dan Sachs, 1991). Model tersebut menggambarkan keterkaitan ekonomi makro berbagai wilayah dunia.

keahliannya. Menurut Schreiner dan Larsen (1985):

"Pengguna model berusaha mendesentralisasikan baik informasi tentang variabel-variabel eksogen maupun evaluasi terhadap hasil simulasi (perhitungan). Proses ini adalah cara yang paling efisien dan murah, serta dapat mengembangkan komunikasi secara profesional di antara para ahli di instansi-instansi yang relevan, karena tiap-tiap ahli diberi kesempatan untuk memandang tugasnya dalam konteks yang luas." [terjemahan bebas, hal. 255]

Manfaat penting lainnya yang muncul dari penggunaan MSG, menurut Schreiner dan Larsen, adalah sebagai wadah untuk mengorganisir informasi yang tersedia tentang perekonomian agar proyek riset dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan yang terpadu.

IV. PENGALAMAN AUSTRALIA

Penggunaan metode KUT sebagai piranti analisis kebijakan di Australia dimulai pada tahun 1975, atau enam belas tahun setelah dibuat pertama kali di Norwegia. Di Amerika Serikat perhatian yang sama juga muncul pada tahun tujuh-puluhan, tetapi baru berkembang di kalangan akademisi yang bidang keahliannya adalah teori abstrak keseimbangan umum dan bukan penentu kebijakan pemerintahan sehari-hari. Di dalam kelompok akademisi, gagasan untuk mengembangkan teori keseimbangan umum secara konkret muncul ketika mesin komputer mulai digunakan di hampir seluruh universitas. Karena itu, istilah 'CGE model' (*Computable General Equilibrium* = Keseimbangan Umum yang dihitung dengan Komputer — model KUK?) sering diartikan sama dengan 'AGE model' (*Applied General Equilibrium* = KUT).

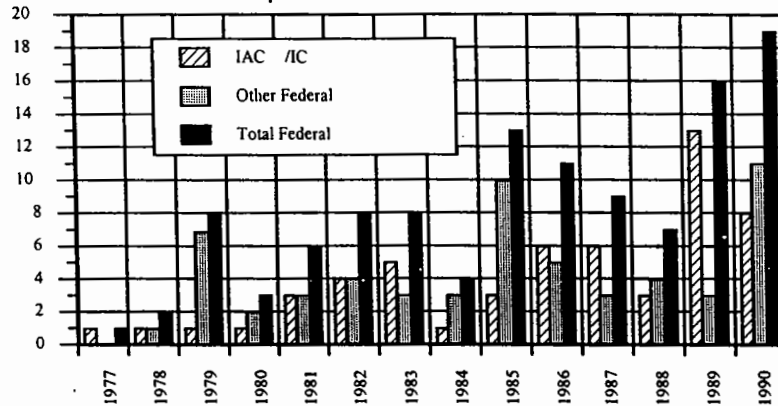
Di Australia prakarsa membangun model KUT muncul di salah satu instansi federal, yaitu Tariff Board. Peranan utama lembaga itu adalah memberi masukan (*advise*) kepada Pemerintah Federal Australia mengenai proteksi industri. Pemimpin lembaga tersebut, almarhum Alf Rattigan (meninggal pada tahun 2000), beserta staf eksekutifnya, Bill Carmichael, menyadari bahwa model perekonomian yang lengkap sangat diperlukan agar kebijaksanaan proteksi industri dapat diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan di bidang lain (misalnya, imigrasi dan tenaga kerja). Tetapi mereka juga menyadari bahwa pada saat itu belum tersedia staf yang memiliki keahlian teknik (*modelling*) yang cukup untuk membangun model yang diperlukannya. Sehingga mereka memutuskan untuk kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki sumber daya untuk membangun model perekonomian yang diperlukannya dimana salah satu kerja sama itu adalah dengan Impact Project.

Model ORANI, yakni model KUT perekonomian Australia yang dibangun oleh Peter Dixon dan rekannya dari Impact Project, Dixon *dkk.* (1981), merupakan suatu usaha yang caranya agak mirip dengan yang terjadi di Norwegia — yaitu, tim terdiri dari pengambil kebijakan (di birokrasi) dan akademisi universitas. Penyediaan dana riset dan pengembangan institusi merupakan tanggung jawab instansi pemerintah, sedangkan dalam hal kepemimpinan intelektual dipegang oleh akademisi universitas.

Sejarah perkembangan dan penggunaan KUT di Australia didokumentasikan dalam beberapa publikasi — lihat Powell dan Snape (1993), Powell dan Lawson (1990), Vincent (1990) dan Dee (1994). Menurut pencipta *GTAP*, sebuah model KUT *multicountry* (global) yang dikembangkan di Universitas Purdue USA (Hertel, Ed. 1997), pengembangan modelnya sangat dipengaruhi oleh pengalaman Australia dalam bidang KUT (Hertel 1994).

Saat ini di Australia jarang sekali penelitian mengenai isu ekonomi yang tergolong penting tidak menggunakan analisis KUT sebagai salah satu metode dalam penyusunan dan analisis kebijakan. Namun menanamkan kepercayaan terhadap KUT di kalangan birokrasi memerlukan banyak waktu. Informasi tentang penggunaan KUT oleh Pemerintah Federal Australia mulai dari pertama kali dikembangkan hingga saat dimana KUT telah digunakan secara meluas ditunjukkan oleh Gambar 1. Sekurang-kurangnya memerlukan satu dasawarsa sebelum kepercayaan secara penuh muncul di kalangan pengambil kebijakan di Australia.

Gambar 1. Penggunaan model ORANI oleh instansi-instansi federal Australia dalam kurun waktu 14 tahun pertama eksistensi model tersebut.



Keterangan: Jumlah studi/laporan tertera di sumbu vertikal [dikutip dari Powell dan Snape (1993)].

Ilustrasi di atas bukan berarti mengarah pada kesimpulan bahwa negara yang baru mengembangkan model KUT terpaksa menunggu selama puluhan tahun sebelum analisis berdasarkan KUT dipercaya oleh pengambil keputusan sebagai *advise* yang dapat diandalkan. Yang perlu ditekankan ialah adanya proses peningkatan yang bertahap namun berkesinambungan, baik dalam hal perbaikan kualitas analisis maupun dalam penerimaan dan kepercayaan terhadap model KUT.

V. BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?

Menelusuri kontribusi metode KUT dalam perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia relatif sulit dibanding negara lain karena keterbatasan publikasi ilmiah dan komunikasi diantara para pemodel KUT. Di Indonesia, metode KUT sudah diperkenalkan pada awal dasawarsa 90an oleh para sarjana/konsultan asing yang bekerja untuk lembaga internasional seperti Bank Dunia (lihat misalnya Devarajan *dkk* (1997) dan Lewis (1991)) atau IFPRI (lihat misalnya Robinson *dkk* (1998)), maupun untuk pemerintah Indonesia, dan juga oleh para sarjana Indonesia yang baru selesai dari studi di luar negeri. Meski demikian, penyebaran metode KUT pada masa itu masih terbatas pada kalangan akademis dan digunakan untuk keperluan ilmiah.

Bappenas barangkali merupakan institusi pemerintah pertama yang menggunakan KUT untuk keperluan perencanaan pembangunan, meski pemanfaatannya sangat terbatas. Akhir-akhir ini mereka sudah jarang melakukan diseminasi model KUT yang mereka kembangkan bersama-sama dengan tim dari Jepang. Pada waktu itu bisa dikatakan masih sangat sedikit instansi pemerintah yang secara serius mengikuti langkah Bappenas.

Kalaupun ada, untuk urusan pemodelan biasanya mereka serahkan sepenuhnya kepada tim studi yang biasanya berasal dari akademisi universitas.

Pada tahun 1997, CoPS (the Centre of Policy Studies di Universitas Monash, Australia) menyelenggarakan sebuah kursus intensif mengenai pemodelan KUT yang lamanya sekitar lima minggu bagi sekelompok kecil ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Kegiatan tersebut memotivasi pengembangan model INDORANI untuk perekonomian Indonesia dengan memanfaatkan model ORANI (Dixon *dkk.*, 1982) sebagai kerangka dasar (template).

Masih pada tahun 1990an, kelompok lain dari Australia yang berbasis di Universitas Adelaide dan Universitas Nasional Australia (ANU) bekerja sama dengan CASER (Bogor) dan CSIS (Jakarta), mengembangkan sebuah model KUT yang diberi nama WAYANG². Model tersebut dibangun menggunakan ORANI-G (Horridge, 2000³) sebagai kerangka dasar.

Selanjutnya, salah satu upaya untuk menyebarkan pemanfaatan KUT di kalangan staf pemerintahan dipelopori oleh CoPS. Disponsori oleh AUSAID (Australian Development Aid Agency), pada tahun 2001 CoPS bekerjasama dengan Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi (PAU–SE)⁴ Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan serangkaian kursus dasar metode KUT di Jakarta maupun di Yogyakarta. Peserta kursus sebagian besar berasal dari kalangan pemerintahan di Jakarta. Sebuah kursus serupa yang lamanya satu minggu juga diadakan oleh kelompok lain dari Australia (Adelaide/ANU) di Jakarta yang bertempat di CSIS pada bulan Juni 2001.

Beberapa peserta terbaik mendapat kesempatan untuk melanjutkan kursus pada tingkat yang lebih tinggi di CoPS, Australia. Sayangnya, program yang bagus tersebut tidak dapat berlanjut karena berbagai hal, seperti keterbatasan dana dan kesibukan kerja para birokrat di instansinya. Tetapi paling tidak, saat ini telah terbangun jaringan di antara para akademisi universitas dengan para staf pemerintahan di Jakarta.

Pada sisi lain, minat kalangan akademisi universitas di Indonesia untuk mengembangkan metode KUT semakin meningkat akhir-akhir ini. Bahkan di beberapa universitas, dasar-dasar metode KUT sudah diperkenalkan pada mahasiswa tingkat sarjana strata satu (undergrad) hingga program doctoral. Tidak sedikit karya ilmiah yang ditulis oleh akademisi dengan menggunakan metode KUT dalam bentuk tesis atau disertasi maupun publikasi di jurnal.

²Dokumen-dokumen program dasar (source program) dan data untuk model WAYANG bisa didownload secara gratis di <http://www.monash.edu.au/policy/oranig.htm> atau di <http://www.adelaide.edu.au/cies/indlist.htm>. Untuk menjalankan model tersebut, diperlukan perangkat lunak GEMPACK versi 6 atau sesudahnya. Penjelasan rinci tentang GEMPACK, serta versi gratis yang bisa didownload untuk menyelesaikan model sederhana, bisa ditemukan di <http://www.monash.edu.au/policy/gempack.htm>.

³Bahan-bahan tentang ORANI-G yang cukup beragam dan lengkap dapat didownload bebas di <http://www.monash.edu.au/policy/oranig.htm>.

⁴Saat ini bernama Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSE-KP).

Dalam usaha memberi kontribusi berupa analisis kebijakan ekonomi, INDORANI telah digunakan sebagai piranti perhitungan pada beberapa studi di Indonesia dengan bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah. Salah satunya adalah perhitungan dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan harga BBM⁵. Selain itu, INDORANI juga dikembangkan di Kantor Menko Perekonomian untuk berbagai analisis kebijakan infrastruktur mulai tahun 2002. Di Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, INDORANI digunakan untuk berbagai analisis kebijakan terutama dalam memperkirakan manfaat tidak langsung pembangunan jalan sejak lima tahun lalu. Sedangkan Departemen Keuangan menggunakan INDORANI untuk menyokong beberapa analisis kebijakan fiskal yang merupakan tugas sehari-hari mereka. Meski demikian, aspek pemodelan KUT masih diserahkan kepada tim peneliti, sedangkan keterlibatan para staf di instansi-instansi tersebut cenderung masih terbatas pada penggalan permasalahan praktis dari topik yang sedang diteliti.

Sejauh ini, berdasarkan pengamatan penulis, ditemukan banyak sekali analisis kebijakan yang memerlukan piranti formal bercakupan luas (economy-wide) seperti halnya KUT. Ini merupakan peluang besar bagi pembuat model untuk mengembangkan KUT sesuai dengan topik yang sedang dikaji. Hanya saja, masih diperlukan waktu dan tenaga untuk mengusahakannya mengingat berbagai kendala struktural yang dihadapi para ahli pemodelan di Indonesia. Dari sekian banyak kendala, dapat disebutkan beberapa diantaranya, yakni;

- Ahli pemodelan KUT di universitas masih langka dan biasanya ahli pemodelan di tingkat universitas belum mengembangkan KUT secara kelembagaan dan berkesinambungan sehingga akselerasi pengembangan model yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji menjadi lambat.
- Lemahnya dokumentasi dan komunikasi diantara para ahli pemodelan KUT.
- Kurangnya pemimpin di instansi pemerintah yang memiliki wawasan pemodelan dalam analisis kebijakan, atau dengan kata lain bahwa pemodelan belum mendapat prioritas utama sebagai teknik analisis kebijakan.
- Kursus mengenai pemodelan KUT jarang diadakan oleh universitas domestik, hanya beberapa lembaga saja yang pernah melakukannya.

Daripada hanya membicarakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kami beranggapan bahwa akan lebih spektakuler dan bermanfaat apabila kita selalu berusaha bersama-sama untuk meningkatkan kualitas dari analisis dan perdebatan mengenai kebijakan ekonomi, dimana hal ini bisa dimungkinkan salah satunya berkat hasil kerja KUT yang bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Hal itu sangat diperlukan dalam upaya untuk mentransformasikan analisis ekonomi yang sah ke dalam perumusan kebijakan yang lebih mendesak.

Pada bagian berikutnya, kami berusaha menyusun beberapa kesimpulan berdasarkan pengalaman Norwegia dan Australia. Jika hal itu bisa diterima oleh para analis kebijakan yang berpengaruh di Indonesia, metode KUT juga akan dapat lebih mudah diterima oleh para analis kebijakan pada level bawahnya.

⁵Kerjasama dengan Pusat Informasi Energi – Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia dan konsultan bidang energi ekonomi dari Amerika yakni EAPO (Energy Analysis and Policy Office) yang disponsori oleh USAID dan AUSAID.

VI. KURSUS KHUSUS KUT

Tiap-tiap lembaga/instansi/perusahaan yang akan menggunakan model KUT (meskipun hanya memanfaatkan hasil perhitungan dan laporan berdasarkan KUT) memerlukan staf yang memahami kerangka dasar metode itu. Kursus khusus yang lamanya satu atau dua minggu sangat bermanfaat untuk:

- membuka jalan dalam memahami versi intisari (*core version*) dari model dengan cara yang relatif cepat;
- membina jaringan profesional yang sangat berguna apabila mantan peserta saling berkomunikasi dan memberi bantuan;
- memberi pengalaman praktis (dengan tangan sendiri) dalam pemakaian model; dan
- sebagai kursus *refresher* (penyegaran) dalam teori ekonomi dan analisis kebijakan ekonomi.

Kursus merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keahlian (*skill*) di samping enam syarat lainnya yang diperlukan dalam proses menghasilkan analisis kebijakan ekonomi yang dapat diandalkan. Susunan lengkap ditunjukkan di bawah ini.

Data-data + Modal manusiawi (ilmu ekonomi) + Modal manusiawi (pengetahuan mengenai komputer) + Hardware + Software + Pengalaman + Kerja keras



Analisis kebijakan ekonomi yang dapat diandalkan !

Kerap kali yang paling sulit diperoleh adalah unsur pertama. Dalam kasus ini, masuknya BPS Norwegia dalam tim MSG bukan suatu kebetulan tetapi memang diperlukan.

VII. APA LAGI YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN?

Eksistensi komunitas pembuat dan pengguna model perlu sekali memanfaatkan metode KUT dalam konteks perdebatan kebijakan. Menurut Powell dan Lawson (1990) atau Powell dan Snape (1993), untuk mengembangkan infrastruktur komunitas pembuat dan pengguna model terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. lebih baik kalau pengembangan model tidak melulu dalam instansi atau lembaga pemerintah, dan tidak melulu dalam universitas;
2. lebih baik kalau data-data dasar (database), struktur model, maupun perhitungan-perhitungan dan laporan yang berdasarkannya dipublikasikan (kalau mungkin) secara bebas;
3. lebih baik kalau komentar-komentar klien yang mendanai pengembangan model diminta oleh tim pembuat (peneliti) model pada tahap desain model tersebut;
4. proses membangun model sebaiknya dijauhkan dari struktur pemerintahan eksekutif.

Yang terakhir ini sebagai jaminan bahwa reputasi alat/model seharusnya tidak semata-mata tergantung kepada penasehat yang pertimbangannya kadang-kadang keliru, ataupun kepada kepopuleran kebijakan yang dianjurkan oleh pemakai model KUT.

Nomor 3 menekankan bahwa model yang berorientasi kebijakan tidak akan berguna kalau tidak ada kerelaan dan antusiasme dari penasehat dan penyusun kebijakan ekonomi dalam menggunakan model KUT sebagai dasar analisis.

Tujuan dari nomor 3 adalah menjamin status keilmiah model: perhitungan-perhitungan yang dihasilkan pengguna model berdasarkan model dan data-data yang digunakan seharusnya juga dapat dihasilkan ulang (direproduksi) oleh pakar yang independen dengan hasil yang sama pula.

Nomor 2 berhubungan dengan keadaan dimana ada kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Tanpa dokumentasi yang lengkap, tidaklah realistis mengharapkan pihak lain akan menerima asumsi-asumsi model sebagai sesuatu yang masuk akal. Sama halnya dalam kasus konsistensi di antara komponen-komponen simulasi. Biasanya pihak pesaing (yang menggunakan metode lain) dapat diandalkan untuk berusaha keras supaya pekerjaan yang kurang baik dalam analisis yang dihasilkan lawannya diperlihatkan. Juga untuk menghormati standar ilmiah dalam menjamin kualitas dan nama baik dari setiap usaha penggunaan model.

Nomor 1 mengakui adanya komplementaritas antara suasana disiplin di birokrasi (yang bekerja menurut program yang telah ditentukan semula), dan suasana akademis yang cenderung kreatif (yang sering kali tidak begitu menghormati program yang bersifat formal dan kaku).

Di atas telah didiskusikan apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan oleh pembuat dan pengguna model. Namun ada satu tugas penting lain bagi mereka yakni: mereka harus bisa meyakinkan pihak sponsor bahwa model KUT mirip dengan piranti kerja (modal) lainnya: kalau tidak dipelihara dan diperbarui secara kontinyu, maka secara berangsur-angsur keduanya sedikit demi sedikit akan merosot (*depreciate*) dan akhirnya menjadi usang (*become obsolete*). Karena itu, investasi dalam satu sistem analisis yang canggih (seperti halnya KUT) bukan untuk jangka pendek, melainkan jangka panjang.

VIII. PENUTUP

Semua pesan dalam paper ini barangkali tidaklah terlalu sulit diterapkan di negara demokratis dan maju seperti halnya Australia dan Norwegia, meskipun melalui rentang waktu yang panjang. Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, agaknya akan mengalami sedikit kesulitan. Meski demikian, negara berkembang akan tetap mendapatkan banyak manfaat dengan menggunakan model KUT terutama analisis yang baik dan komprehensif dimana hal ini akan sangat membantu proses penyusunan dan analisis kebijakan ekonominya serta meningkatkan kualitas dari kebijakan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dee, Phillppa. "General Equilibrium Models and Policy Advice in Australia", Paper presented at the ifac Workshop on Computing in Economics and Finance, Amsterdam, Juni, 1994, hal. 8-10.
- Devarajan, Shantayanan, Hafez Ghanem dan Karen Thierfelder. "Economic Reform and Labour Unions: A General Equilibrium Analysis Applied to Bangladesh and Indonesia", *World Bank Economic Review*, Vol. 11, No. 1, 1997, hal. 145-170.
- Dixon, P.B., B.R. Parmenter, J. Sutton, dan D.P. Vincent. *ORANI: A Multisectoral*

Model of the Australian Economy. Amsterdam: North-Holland, 1982.

- Førsund, Finn R., Michael Hoel dan Svein Longva.** *Production, Multi-Sectoral Growth and Planning—Essays in Memory of Leif Johansen*. Amsterdam: North-Holland, 1985.
- Hertel, Thomas W.** *Global Trade Analysis: Modeling and Applications*. New York: Cambridge University Press, 1997.
- Hertel, T.W.** "Taking IMPACT Abroad: The Global Trade Analysis Project", Paper presented at the IFAC Workshop on Computing in Economics and Finance. Amsterdam, Juni, 1994, hal. 8-10.
- Horridge, Mark.** "Orani-G: A General Equilibrium Model of the Australian Economy", Monash University, *Centre of Policy Studies and Impact Project Preliminary Working Paper* No.OP-93, 2000.
- Johansen, Leif.** *A Multi-Sectoral Study of Economic Growth*. Amsterdam: North-Holland, 1960: 2nd enlarged edition, 1974.
- Lewis, Jeffrey D.** "A Computable General Equilibrium (CGE) Model of Indonesia", Harvard Institute for International Development, *Development Discussion Paper* No. 378, 1991, hal. 71.
- McKibbin, Warwick J. Jeffrey D. Sachs.** *Global Linkages—Macroeconomic Interdependence and Cooperation in the World Economy*. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1991.
- Powell, Alan A. and Richard H. Snape.** "The Contribution of Applied General Equilibrium Analysis to Policy Reform in Australia", *Journal of Policy Modeling*, Vol. 15, No. 4, Agustus, 1993, hal. 393-414.
- Powell, Alan A. and Tony Lawson.** "A Decade of Applied General Equilibrium Modelling for Policy Work", Ch. 8 in Lars Bergman, Dale W. Jorgenson and Erno Zalai (eds), *General Equilibrium Modeling and Economic Policy Analysis*. Cambridge, Mass: Blackwell, 1990, hal. 241-90.
- Powell, Alan A.** "The Major Streams of Economy-Wide Modeling: Is Rapprochement Possible?" in J. Kmenta and J.B. Ramseye (eds), *Large Scale Econometric Models: Theory and Practice*. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1981, hal. 219-64.
- Robinson, Sherman, Moataz El-Said, dan Nu Nu San.** "Rice Policy, Trade, and Exchange Rate Changes in Indonesia: A General Equilibrium Analysis", *Journal of Asian Economics*, 1998, Vol. 9, No. 3.
- Schreiner, Per and Knut Arild Larsen** "On the Introduction and Application of the MSG Model in the Norwegian Planning System", in Førsund *dkk* (eds), 1985. hal. 241-269.
- Vincent, David P.** "Applied General Equilibrium Modelling in the Australian Industries Assistance Commission: Perspectives of A Policy Analyst", Ch. 9 in Lars Bergman, Dale W. Jorgenson and Erno Zalai (eds), *General Equilibrium Modeling and Economic Policy Analysis*. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1990, hal.291-347.